

## ABSTRAK

**Vera Yulia:** *Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online melalui media social dihubungkan dengan pasal 43 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik di Polda Jabar*

Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang memiliki penduduk pendatang terbanyak setelah Jakarta hal ini memacu perkembangan pola pikir yang sangat pesat salah satunya adalah penggunaan computer dan internet sebagai salah satu informasi yang telah menjadi kebutuhan masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya dampak negative salah satunya adalah prostitusi *online* yang di timbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut, yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada satu tindak kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya yang menggunakan perangkat komputer, *handphone* dan media elektronik yang disambungkan dengan internet

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di Polda Jawa barat.2). Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial di Polda Jabar. 3). Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di Polda Jabar

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan menggunakan studi kasus sebagai bahan *Das Sollen dan Das Sein*, dengan mengambil jenis dan sumber data yang berkaitan dengan masalah dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang terkumpul di analisis dengan metode analisis isi dan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana *cybercrime* khususnya prostitusi *online* masih blm efektif dan marak terjadi di Jawa Barat, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang masih belum bisa menjerat para pelaku Tindak pidana prostitusi *online*. Dari ruang lingkup dan jenis alat seperti prostitusi melalui *facebook*, *twitter*, *we chat* dan *line* kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia aparat penegak hukum masih sangat kurang, adapun upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem jaringan komputer, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparat penegak hukum meningkatkan kerja sama antara instansi yang berwenang, serta meningkatkan kesadaran warga Jawa Barat mengenai dunia maya, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik